



KR-Abdul Alim

Prosesi umbul donga selamat Kantor Desa Pablengan Kecamatan Matesih.

SELAMATAN KANTOR DESA Digelar ‘Umbul Donga’

KARANGANYAR (KR) - Pemerintah Desa Pablengan Kecamatan Matesih, kini memiliki kantor desa baru yang diresmikan belum lama ini. Peresmian ditandai prosesi *umbul donga* dan atraksi kesenian tradisional. Prosesi diawali kirab para pejabat kecamatan menuju kantor baru. Seniman reog juga ikut beratraksi dalam rombongan kirab.

Peresmian dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi, serta jajaran pemerintahan, anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan kantor desa yang telah berlangsung cukup lama.

“Pembangunan kantor desa ini bukan hal yang instan. Dibutuhkan kerja sama dan perjuangan panjang dari berbagai pihak. Kini, masyarakat Pablengan memiliki kantor desa yang lebih layak untuk pelayanan publik,” ungkap Timotius Suryadi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa gedung ini merupakan hasil dari perjuangan dan kerja keras bersama. Meskipun sudah berdiri dengan megah, masih ada beberapa kebutuhan tambahan yang akan diupayakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Sekda juga berpesan kepada Kepala Desa dan perangkatnya agar mengutamakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Saya berpesan kepada Kepala Desa dan perangkatnya agar gedung ini tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga menjadi pusat pelayanan terbaik bagi warga. Jaga, rawat, dan manfaatkan dengan maksimal,” tambahny.

Dengan adanya fasilitas baru ini, ia berharap kualitas layanan desa semakin meningkat dan membawa manfaat bagi masyarakat Pablengan. “Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan pelayanan desa semakin prima dan kesejahteraan warga Pablengan meningkat,” pungkasnya. **(Lim)-f**

Buka Sambungan hal 1

Pernyataan sikap disampaikan di sela-sela acara ‘UlinYastrasore#6’ yang kali ini dilaksanakan di Gedung Sardjito Ull di Jalan Kaliurang Km 14,5 Sleman. Dalam acara bertema ‘Lawan Ketidakadilan’ ini terkumpul 97 puisi karya sivitas akademika Ull, namun hanya dibacakan 30 puisi.

Fathul kepada pers mengungkapkan, pernyataan sikap ini disampaikan karena banyak muncul kegelisahan di banyak tempat dan banyak hal. “Tapi tidak ada yang secara bersama-sama melantangkan. Ini merupakan upaya kolektif melantangkan kegelisahan yang sudah lama tersimpan,” tandas Fathul.

Dalam pernyataan sikap berisi 6 butir itu, juga menuntut pemerintah

Menhub: Sambungan hal 1

Kemudian untuk jalur laut, Ditjen Perhubungan Laut menyediakan tiket gratis kapal laut dengan kuota 47.816 penumpang dan jumlah rute sebanyak 153 ruas.

Berikutnya untuk kereta api, Ditjen Perkeretaapian menye-

Mafia Sambungan hal 1

yakni mark up impor minyak mentah dan BBM, serta blending BBM dari Peralite (Ron 90) menjadi Pertamina (Ron 92). Dalam praktiknya, minyak mentah produksi dalam negeri ditolak diolah di kilang Pertamina dengan alasan spesifikasinya tidak sesuai dengan kualifikasi Kilang Pertamina, sehingga harus impor minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri. Dengan alasan kapasitas kilang tidak memenuhi, maka BBM masih harus impor dalam jumlah besar. Harga impor minyak mentah dan BBM itu telah dimarkup sehingga merugikan keuangan negara yang harus membayar impor tersebut lebih mahal.

Mark-up juga dilakukan pada kontrak pengiriman (shipping), dengan tambahan biaya ilegal sebesar 13% hingga 15%.

Tindak pidana korupsi itu tidak hanya merampok uang negara, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen BBM, yang membayar harga Pertamina namun yang diperoleh Peralite yang harganya lebih murah. Kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara dan masyarakat tampaknya mulai dialihkan pada perdebatan modus blending dengan mengaburkan modus perampokan negara melalui markup impor minyak mentah, impor BBM dan pengapalan impor minyak mentah dan BBM.

Perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina terkait kebenaran blending justru berpotensi mendorong migrasi konsumen

SUKOHARJO (KR)

Nilai tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pabrik PT Sritex sekitar Rp 1 miliar dan wajib dibayarkan. Pemkab Sukoharjo nantinya tetap melakukan penagihan pembayaran kepada pihak kurator atau investor. Apabila tidak dibayar maka akan menjadi piutang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko mengatakan, PT Sritex ikut memberikan kontribusi kepada Pemkab Sukoharjo melalui pembayaran PBB setiap tahun dengan nilai sekitar Rp 1 miliar. Angka tersebut cukup besar untuk aset tanah dan ba-

ngunan pabrik.

Disebutkan, aset PT Sritex tersebut berada di wilayah Kelurahan Jetis dan Banmati Kecamatan Sukoharjo. PBB tersebut wajib dibayarkan setiap tahun. Meskipun pabrik tekstil PT Sritex telah tutup, PBB tetap wajib dibayarkan oleh wajib pajak. “Nanti kami akan melakukan penagihan kepada pihak kurator atau investor yang menangani PT Sritex setelah tutup,” ungkap Richard.

Sementara itu, buruh PT Sritex terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mengikuti pendataan pencairan tunjangan hari tua (THT). Kegiatan digelar di gedung pertemuan pabrik PT



KR-Dok Pemkab Sukoharjo

Bupati Sukoharjo dan Wakil Bupati Sukoharjo memantau pendataan pencairan JHT buruh PT Sritex.

Sritex mulai Rabu (5/3). Pemberkasan dilakukan buruh dengan melengkapi persyaratan, salah satunya rekening bank untuk proses transfer uang pembayaran THT.

Terkait hal itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mendatangi pabrik PT Sritex untuk memantau pencairan JHT buruh ter-

dampak PHK, Rabu (5/3). Bupati ingin memastikan pelayanan sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan kepada buruh. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyono.

Untuk pembayaran JHT buruh PT Sritex yang di-PHK, BPJS Ketenagakerjaan total menyediakan dana Rp 125 miliar. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta, Teguh Wiyono mengatakan pelayanan perdana dilakukan untuk 1.000 orang. BPJS Ketenagakerjaan Surakarta menjadwalkan pelayanan selama 10 hari. Setiap hari petugas akan melayani 1.000 buruh terdampak PHK PT Sritex. **(Mam)-f**

19 TAHUN BERMASALAH DI BANYUMAS

Aset Kebondalem Kembali ke Pemkab

BANYUMAS (KR)

Setelah hampir dua dekade bermasalah, aset kompleks Kebondalem di Purwokerto Kabupaten Banyumas akhirnya resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah Ponco Hartanto kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Penyerahan dilakukan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Rabu (4/3).

Penyerahan aset tersebut menjadi tonggak penting setelah 19 tahun mengalami sengketa hukum. Keberhasilan pengembalian aset pun

bertepatan dengan kepemimpinan Bupati Sadewo dan Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti di Banyumas. Kajati Jateng Ponco Hartanto menegaskan bahwa pengem-

balian aset Kebondalem dilakukan setelah seluruh proses hukum diselesaikan.

“Prinsip utama dalam kasus ini adalah asset recovery, yaitu memastikan



KR-Driyanto

Kajati Jateng Ponco Hartanto secara simbolis menyerahkan pengelolaan aset kompleks Kebondalem kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

aset kembali ke negara dengan status hukum yang jelas. Dengan demikian, tidak ada lagi kerugian negara, dan kasus hukumnya dinyatakan selesai tanpa perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ungkap Ponco Hartanto.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan terimakasih kepada Kejati Jateng dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng. Kemudian pihaknya segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penilaian ulang terhadap aset yang ada sebelum merancang skema pemanfaatannya.

“Langkah selanjutnya

adalah, menghitung nilai aset bersama BPKP. Setelah itu, kami akan merumuskan strategi pengelolaannya agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Banyumas,” ungkapnya.

Meski belum membeberkan detail rencana ke depan, Sadewo memastikan Pemkab Banyumas terbuka bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan Kebondalem. “Kami sudah memiliki konsep pengelolaan, namun akan kami sampaikan pada waktunya. Yang jelas, setiap langkah akan dilakukan secara profesional dan tetap dalam pengawasan hukum,” tegasnya. **(Dri)-f**

JELANG IDUL FITRI

Bank BPD DIY Layani Penukaran Uang Baru



KR-Istimewa

Santoso Rohmad melakukan flag off Mobil Kas Keliling Bank BPD DIY saat peluncuran Program Serambi 2025.

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) menyiapkan kurang lebih Rp 1,2 miliar uang layak edar (ULE) untuk melayani kebutuhan penukaran uang baru masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Sementara kebutuhan likuiditas masih terjaga untuk operasional Bank BPD DIY secara keseluruhan di sekitar Rp 600 miliar yang akan dipenuhi dari BI dan penukaran uang antarbank.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyata-

kan, Bank BPD DIY berkomitmen melayani penukaran uang layak edar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menciptakan kondisi keuangan yang inklusif, cepat, dan efisien. Penukaran uang baru tersebut memprioritaskan optimalisasi jumlah masyarakat yang dapat ikut serta sehingga distribusinya lebih merata.

“Bank BPD DIY telah dipercaya sebagai salah satu perbankan yang senantiasa berpartisipasi dalam melayani penukaran uang layak edar jelang Lebaran selama ini. Angka ketersediaan uang kartal tersebut kurang lebih serupa dengan persediaan pada momentum yang sama tahun sebelumnya,” ujar Santoso di kantornya, Kamis (6/3). **(Ira)-d**

BSI JADI BANK EMAS

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA (KR) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat komitmen untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, setelah perseroan resmi ditunjuk sebagai salah satu pengelola bisnis bank emas atau bulion bank pertama di Indonesia pada 26 Februari lalu.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna di Kantor BSI Pusat, Gedung The Tower, Jakarta, Rabu (5/3) mengatakan, emas menjadi komoditas

yang akan terus dikembangkan perseroan sebagai new game changer di industri perbankan syariah.

“Hal tersebut didasari potensi dan peluang pengembangan alternatif bisnis yang memberikan nilai investasi bagi masyarakat. Diresmikannya BSI sebagai salah satu entitas yang menjalankan bisnis bank emas berpotensi memberikan manfaat untuk masyarakat, industri, dan pertumbuhan perekonomian nasional melalui optimalisasi ekosistem ekonomi syariah,” ujarnya. **(Ogi)-d**

Danantara untuk Masa Depan Indonesia



Fahrul Imam Santoso, SE MAK Ak CA CFR
Sekretaris Prodi Akuntansi
Universitas Amikom Yogyakarta

PADA Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran ini menandai babak baru dalam pengelolaan aset dan investasi negara yang diharapkan mampu menjadi

katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Danantara merupakan badan pengelola investasi strategis yang bertujuan mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama “Danantara” sendiri memiliki makna filosofis yang dalam: “Daya” berarti energi, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lembaga ini diproyeksikan akan mengelola aset senilai US\$900 miliar (sekitar Rp14.000 triliun), menjadikannya salah satu *sovereign*

wealth fund terbesar di dunia, sejajar dengan Qatar Investment Authority dan Kuwait Investment Authority.

Struktur organisasi Danantara dirancang dengan mengadopsi praktik terbaik dari *sovereign wealth fund* global. Dipimpin oleh dewan pengawas yang diketuai langsung oleh Presiden, dengan anggota terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan beberapa menteri terkait lainnya. Sementara operasional sehari-hari dipimpin oleh dewan direksi yang terdiri dari profesional dengan rekam jejak cemerlang di bidang investasi dan keuangan.

Salah satu tujuan utama pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo menyatakan bahwa Danantara merupakan konsolidasi semua kekuatan ekonomi Indonesia yang ada dalam pengelolaan BUMN. Dengan model *superholding* yang terinspirasi dari

Temasek Holdings Singapura, Danantara diharapkan dapat menjadi solusi strategis dan efisien untuk mengoptimalkan kinerja BUMN.

Reorganisasi BUMN di bawah Danantara akan mengatasi masalah tumpang tindih bisnis antar BUMN yang selama ini kerap terjadi. Misalnya, beberapa BUMN yang bergerak di sektor energi akan dikonsolidasikan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi operasional. Hal ini diproyeksikan dapat menghemat biaya operasional hingga 30% dan meningkatkan nilai kapitalisasi pasar BUMN secara keseluruhan.

Keberadaan Danantara bertujuan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai target pemerintahan saat ini. Melalui pengelolaan aset BUMN untuk diinvestasikan ke dalam sektor yang aman, strategis, dan menguntungkan, Danantara diharapkan dapat menjadi kendaraan pembawa aset untuk menuju lokasi investasi

yang menguntungkan dan meningkatkan nilai kepada lembaga pemilik awalnya.

Presiden Prabowo Imenekankan komitmennya untuk tidak lagi menjual sumber daya alam Indonesia dengan harga murah atau sekadar menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain. Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, pembangunan kilang minyak, produksi pangan dan protein, serta pengembangan energi terbarukan

Danantara diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk berbagai program pembangunan yang dicanangkan pemerintah, termasuk di bidang pertanian, industri, perumahan, energi, dan lainnya. Dalam tahap awal, Danantara akan mengalokasikan investasi senilai US\$20 miliar (sekitar Rp300 triliun)



yang berasal dari hasil efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo.

Peluncuran Danantara menandai langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengelola aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan visi menjadi pengelola investasi terkemuka yang mendukung transformasi ekonomi Indonesia, Danantara diharapkan dapat menjadi kekuatan baru yang membawa Indonesia menuju kemakmuran dan kemendirian ekonomi. Namun, keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menerapkan tata kelola yang baik dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.